

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga ekonomi berbadan hukum yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan. Lembaga ini didirikan untuk mengelola aset, mengembangkan potensi ekonomi, dan menyediakan layanan publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara inklusif (Hardijono et al., 2020, p. 14).

Sebagai instrumen strategis, eksistensi BUMDes diperkuat secara yuridis melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Regulasi tersebut menuntut BUMDes tidak hanya beroperasi sebagai entitas bisnis yang mengejar keuntungan finansial semata, melainkan juga sebagai agen sosial yang digerakkan bersama komunitas lokal. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan BUMDes tidak dapat dipisahkan dari sejauh mana masyarakat dilibatkan, sebab partisipasi aktif warga merupakan faktor utama dalam menentukan efektivitas pembangunan ekonomi desa agar program yang dijalankan tepat sasaran dan memiliki legitimasi sosial yang kuat (Rismanita & Pradana, 2023, p. 66).

Secara teoritis, partisipasi dalam konteks pembangunan masyarakat bukan sekadar kehadiran fisik atau pemenuhan kuota administratif, melainkan wujud keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam situasi kelompok

yang mendorongnya untuk memberikan kontribusi serta bertanggung jawab penuh terhadap pencapaian tujuan bersama (Soetomo, 2018, p. 114). Dalam ekosistem pengelolaan BUMDes, ruang partisipasi tersebut mencakup andil masyarakat secara komprehensif, mulai dari tahapan perencanaan melalui musyawarah desa, pelaksanaan operasional unit usaha, pemanfaatan produk layanan, hingga pengawasan terhadap akuntabilitas pengurus. Ketika iklim partisipasi ini berjalan dengan optimal, tata kelola BUMDes akan menjadi lebih transparan, yang pada gilirannya akan mendongkrak performa usaha, memaksimalkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes), serta mewujudkan kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan (Rahmawati, 2024, p. 115).

Arah kebijakan otonomisasi ekonomi ini telah diimplementasikan oleh Desa Kota Raja, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berdasarkan data Desa Kota Raja tahun 2024, jumlah penduduk tercatat sebanyak 3.698 jiwa yang tersebar dalam 11 Rukun Tangga (RT). Desa Kota Raja termasuk dalam kategori desa maju dan inovatif, yang ditandai dengan keberhasilannya meraih Juara I Lomba Desa Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024. Prestasi tersebut tidak terlepas dari penerapan inovasi teknologi informasi dalam sistem pelayanan publik yang dikelola oleh pemerintah desa. Faktor administratif dan kapasitas modal sosial ini secara teoritis menjadi fondasi yang sangat prospektif bagi akselerasi pengembangan lembaga ekonomi desa.

Eksistensi kelembagaan tersebut diwujudkan secara empiris melalui pendirian BUMDes Berkah Bersama sejak tahun 2022. Hingga saat ini,

BUMDes Berkah Bersama telah mengelola enam unit usaha produktif, antara lain:

1. Layanan Brilink,
2. Katering,
3. Perikanan,
4. Pengisian air galon,
5. Produksi es batu, dan
6. Penjualan frozen food.

. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, BUMDes ini berhasil mencatat omzet sekitar Rp200 juta, yang menunjukkan adanya potensi ekonomi desa yang cukup besar apabila dikelola secara optimal.

Namun demikian, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan dua orang masyarakat Desa Kota Raja, diperoleh informasi riil mengenai hambatan keterlibatan publik di lapangan, yaitu:

1. Warga mengaku jarang dilibatkan secara intensif dalam forum perencanaan atau penentuan unit usaha baru, sehingga mereka merasa keberadaan BUMDes kurang menyentuh kebutuhan mendasar kelompok usaha kecil milik masyarakat.
2. Kurangnya transparansi informasi berkala mengenai perkembangan keuntungan operasional BUMDes kepada publik, yang berimplikasi pada munculnya sikap apatis dan keraguan warga untuk ikut serta memanfaatkan maupun mengawasi unit usaha yang ada.

Kondisi tersebut linier dengan hasil observasi langsung peneliti di lapangan, yang mengidentifikasi adanya beberapa permasalahan spesifik terkait partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes, di antaranya:

1. Masyarakat masih banyak yang belum terlibat dalam pengelolaan BUMDes.

2. Minimnya sosialisasi dari desa tentang kegiatan BUMDes sehingga banyak masyarakat yang belum tahu dan akhirnya banyak yang tidak berminat.

Kondisi tersebut menggambarkan adanya kesenjangan (gap analysis) antara harapan terhadap partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa (das sollen) dengan realitas empiris di lapangan (das sein), sehingga diperlukan upaya ilmiah untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan warga dalam pengelolaan BUMDes Berkah Bersama. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal tersebut, peneliti mendapati adanya elemen kebaruan fenomena (novelty) yang membedakan penelitian ini dengan kajian terdahulu, yaitu:

1. Paradoks Predikat Inovatif Desa terhadap Partisipasi Publik: Adanya anomali sosiologis di mana Desa Kota Raja sukses menyandang status sebagai Desa Maju Inovatif dan Juara I Lomba Desa Tingkat Provinsi, namun tata kelola ekonomi desanya justru menghadapi realitas rendahnya partisipasi aktif dari masyarakat akar rumput.
2. Keterbatasan Efek Stimulus Keterlibatan Internal: BUMDes Berkah Bersama secara operasional melibatkan kelompok milenial dan perempuan secara dominan dalam unit usaha yang variatif, namun tingginya kuantitas keterlibatan internal tersebut belum mampu menstimulus kualitas partisipasi pengawasan dari masyarakat luas secara eksternal.

Penelitian ini memiliki urgensi yang sangat tinggi untuk dilakukan guna merumuskan formulasi strategi manajerial yang tepat bagi pengelola dalam mengintegrasikan aspirasi publik ke dalam sistem tata kelola BUMDes. Sebaliknya, apabila penelitian ini tidak dilakukan dan aksentuasi masalah

rendahnya partisipasi dibiarkan tanpa adanya evaluasi ilmiah, maka dikhawatirkan akan terjadi implikasi negatif bagi desa. Dampak tersebut antara lain: menurunnya tingkat keberlanjutan operasional unit usaha BUMDes, hilangnya kepercayaan (*distrust*) masyarakat terhadap akuntabilitas pengurus, terjadinya stagnasi dana usaha secara permanen, serta terhambatnya optimalisasi potensi ekonomi lokal yang pada akhirnya dapat mengancam status kemandirian ekonomi Desa Kota Raja di masa depan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ini lebih mendalam melalui sebuah penelitian ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: “Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama di Desa Kota Raja Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara”.

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan fenomena masalah di atas maka penelitian ini terfokus pada partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes di desa kota raja, apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan BUMDes, sehingga judul yang diambil adalah “Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama di Desa Kota Raja Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara”.

### **1. Partisipasi Masyarakat (Variabel X)**

Teori Partisipasi Masyarakat menurut Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (dalam Mustanir *et al.*, 2022, p. 59)

- a. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan (*Decision Making*)
- b. Partisipasi dalam Pelaksanaan (*Implementation*)

- c. Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat (*Benefit Sharing*)
- d. Partisipasi dalam Evaluasi (*Evaluation*)

## 2. Pengelolaan BUMDes (Variabel Y)

Teori Pengelolaan George R. Terry (dalam Hasibuan, 2016:15)

- a. Perencanaan (*Planning*)
- b. Pengorganisasian (*Organizing*)
- c. Pelaksanaan (*Actuating*)
- d. Pengawasan (*Controlling*)

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang serta batasan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan BUMDes Berkah Bersama di Desa Kota Raja Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Seberapa besar pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes di Desa Kota Raja Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes Berkah Bersama di Desa Kota Raja, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes Berkah Bersama di Desa Kota Raja, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Administrasi Publik, khususnya dalam kajian manajemen pembangunan desa dan partisipasi masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin menelaah hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat dan efektivitas pengelolaan BUMDes.

### b. Manfaat Praktis

#### 1. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar evaluasi dalam upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat pada kegiatan pengelolaan BUMDes, sehingga dapat mendorong peningkatan ekonomi dan kemandirian desa.

## 2. Bagi Pengelola BUMDes

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi pemberdayaan masyarakat serta memperkuat sistem partisipasi publik agar pengelolaan BUMDes lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

## 3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan BUMDes sebagai bentuk kontribusi nyata dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan desa.

